

Rencana Aksi Akselerasi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh DISPERINDAG Kabupaten Bengkayang

Bab 1: Dekonstruksi Kerangka Penilaian APE untuk Sektor Perindustrian dan Perdagangan

1.1. Memahami Logika Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di tingkat daerah. Untuk meraih penilaian terbaik, pemahaman mendalam terhadap filosofi dan mekanisme evaluasi APE adalah krusial. Penilaian APE bukanlah sekadar pemenuhan daftar periksa administratif, melainkan sebuah evaluasi komprehensif terhadap berjalannya suatu sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, di mana perspektif gender telah menjadi bagian integral dari setiap siklus pembangunan.

Proses evaluasi APE dirancang secara multi-tahap untuk memverifikasi klaim dan mengukur dampak secara faktual. Tahapan ini meliputi:

1. **Evaluasi Mandiri:** Tahap awal di mana pemerintah daerah, termasuk setiap Perangkat Daerah (PD) seperti DISPERINDAG, melakukan penilaian internal berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan. Pada fase ini, pengumpulan bukti dukung yang relevan dan akurat menjadi fondasi utama.
2. **Verifikasi Administrasi:** Tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen serta bukti dukung yang diserahkan. Setiap klaim dalam formulir evaluasi harus didukung oleh dokumen resmi, laporan kegiatan, foto, atau produk hukum yang sah.
3. **Verifikasi Lapangan:** Tim penilai dapat melakukan kunjungan sampling untuk memvalidasi data dan informasi yang telah diserahkan. Wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi program, dan pemeriksaan fasilitas di lapangan menjadi bagian dari tahap ini untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan implementasi nyata.
4. **Verifikasi Akhir:** Penetapan kategori penghargaan (Pratama, Madya, Utama, Mentor) berdasarkan akumulasi hasil dari seluruh tahapan verifikasi.

Dengan memahami alur ini, DISPERINDAG Kabupaten Bengkayang harus mengadopsi pola pikir strategis sejak awal: setiap inisiatif, program, dan kebijakan yang diimplementasikan harus direncanakan dengan mekanisme dokumentasi yang sistematis dan bukti yang dapat diverifikasi. Keberhasilan dalam APE tidak ditentukan pada saat pengisian formulir, melainkan dibangun melalui serangkaian tindakan nyata yang terdokumentasi dengan baik sepanjang tahun.

1.2. Analisis Mendalam 7 Indikator Prasyarat PUG dan Relevansinya bagi DISPERINDAG

Untuk membangun sistem PUG yang solid, tujuh indikator prasyarat harus dipenuhi. Indikator-indikator ini menjadi fondasi yang dinilai dalam APE dan memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsi DISPERINDAG.

1. **Komitmen:** Penilaian APE menuntut adanya kebijakan daerah (Perda atau Peraturan Kepala Daerah) sebagai landasan hukum PUG. Bagi DISPERINDAG, komitmen ini harus diturunkan menjadi kebijakan internal, seperti Surat Keputusan Kepala Dinas atau pedoman teknis, yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap PUG dalam sektor perindustrian dan perdagangan.
2. **Kebijakan Teknis & Program Responsif Gender:** Ini adalah domain utama DISPERINDAG. Penilaian akan berfokus pada apakah dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) telah mengintegrasikan analisis gender dan menghasilkan program yang secara spesifik menyoal isu kesenjangan gender di bidang ekonomi, misalnya program pemberdayaan wirausaha perempuan atau revitalisasi pasar yang aman bagi perempuan.
3. **Kelembagaan PUG:** Struktur organisasi yang mendukung PUG harus ada dan berfungsi. Di tingkat dinas, ini diwujudkan melalui pembentukan *Focal Point* PUG, yaitu tim atau pejabat yang secara khusus ditugaskan untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan implementasi PUG di lingkungan internal DISPERINDAG.
4. **Sumber Daya Manusia (SDM) & Anggaran:** Formulir APE secara rinci meminta data jumlah SDM yang telah terlatih PUG, baik di level perencana, pelaksana teknis, maupun tim monitoring dan evaluasi. Selain itu, alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dapat dipertanggungjawabkan melalui

Gender Budget Statement (GBS) menjadi bukti konkret komitmen anggaran.

5. **Data, Sistem Informasi & KIE:** Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin adalah prasyarat mutlak. DISPERINDAG harus mampu menyajikan data mengenai jumlah pelaku IKM/UMKM binaan (laki-laki dan perempuan), jumlah pedagang pasar, partisipan pelatihan, dan penerima manfaat program lainnya secara terpilah.
6. **Mekanisme Informasi & Metode Pelaksanaan:** Penilaian menuntut penggunaan alat analisis gender yang standar, yaitu *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam tahap perencanaan dan GBS dalam tahap penganggaran. DISPERINDAG harus dapat menunjukkan bukti penggunaan alat-alat ini dalam penyusunan program-programnya.
7. **Peranserta Masyarakat dan Jejaring:** APE mengukur sejauh mana pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Bagi DISPERINDAG, ini berarti membangun kemitraan formal dan terdokumentasi dengan "Dunia Usaha" (misalnya melalui program CSR) dan "Lembaga Masyarakat" seperti asosiasi pengusaha (contoh: IWAPI) dan dewan kerajinan (DEKRANASDA).

1.3. Identifikasi Area Prioritas: *Quick Wins* dan Intervensi Jangka Panjang

Untuk mencapai akselerasi, DISPERINDAG perlu memetakan intervensi ke dalam dua kategori: *quick wins* (kemenangan cepat) yang dapat segera diimplementasikan untuk menunjukkan kemajuan signifikan, dan intervensi jangka panjang yang bersifat sistemik untuk keberlanjutan.

- **Quick Wins:**
 - Memformalkan kemitraan yang sudah ada (misalnya dengan DEKRANASDA dan IWAPI) melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup kegiatan bersama dan pelaporan.
 - Merevisi formulir pendataan IKM/UMKM dan pedagang pasar dengan menambahkan kolom wajib "Jenis Kelamin" dan data terpilah lainnya.
 - Mengadakan sosialisasi PUG tingkat dasar bagi seluruh staf DISPERINDAG.
- **Intervensi Jangka Panjang:**
 - Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menggunakan GAP dan GBS secara sistematis untuk semua program unggulan.
 - Mengembangkan kurikulum pelatihan kewirausahaan berjenjang dan berkelanjutan yang responsif gender.
 - Melakukan revitalisasi pasar rakyat secara bertahap dengan mengintegrasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan perspektif gender.

Kerangka penilaian APE pada hakikatnya adalah sebuah cetak biru untuk tata kelola yang baik. Keberhasilan tidak diukur dari satu program yang luar biasa, melainkan dari kemampuan menunjukkan sebuah siklus yang berfungsi utuh. Adanya SDM yang terlatih (Prasyarat 4) memungkinkan penyusunan GAP dan GBS yang berkualitas (Prasyarat 6). Analisis ini kemudian menjadi dasar justifikasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam dokumen penganggaran (Tahap Penganggaran). Anggaran yang disetujui digunakan untuk melaksanakan program yang dirancang dengan baik (Tahap Pelaksanaan), yang pada gilirannya menghasilkan data terpilah (Prasyarat 5) yang akurat untuk digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi ini menjadi umpan balik untuk perencanaan di siklus berikutnya. Dengan demikian, strategi DISPERINDAG harus bersifat holistik dan sistemik, memastikan setiap elemen saling terhubung dan dapat dibuktikan.

Bab 2: Penguatan Fondasi Kelembagaan PUG di Lingkungan Internal DISPERINDAG

2.1. Peningkatan Kapasitas SDM: Menjawab Kebutuhan Kunci Penilaian APE

Salah satu indikator dengan bobot penilaian signifikan dalam evaluasi APE adalah ketersediaan SDM yang terlatih PUG. Tanpa aparatur yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai, implementasi PUG akan menjadi sebatas formalitas. Oleh karena itu, investasi pada peningkatan kapasitas SDM merupakan langkah strategis yang mendesak.

Rekomendasi Aksi:

1. **Audit Kompetensi PUG Internal:** Lakukan pemetaan kompetensi staf DISPERINDAG saat ini terhadap kategori yang diminta dalam formulir APE: SDM Perencana dan Penganggaran, SDM Teknis/Pelaksana, serta SDM Pemantau, Evaluasi, dan Pelaporan. Audit ini akan mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan menjadi dasar penyusunan program pelatihan yang terarah.
2. **Menyusun Rencana Pelatihan Multi-Tahun:** Berdasarkan hasil audit, susunlah rencana pelatihan yang sistematis untuk 3-5 tahun ke depan. Targetkan persentase minimum staf di setiap kategori fungsional untuk mendapatkan pelatihan PUG. Materi pelatihan harus mencakup konsep dasar gender, teknik analisis menggunakan GAP, penyusunan GBS, serta metode monitoring dan evaluasi yang responsif gender.
3. **Menciptakan Fasilitator PUG Bersertifikat:** Identifikasi beberapa staf potensial untuk mengikuti program pelatihan fasilitator PUG yang diselenggarakan oleh Kemen PPPA atau lembaga mitra yang diakui. Keberadaan fasilitator internal bersertifikat merupakan poin penilaian yang tinggi karena menunjukkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan internalisasi PUG secara mandiri dan berkelanjutan.

2.2. Optimalisasi Peran *Focal Point* PUG DISPERINDAG

Implementasi PUG yang efektif memerlukan motor penggerak di tingkat dinas. Peran ini diemban oleh *Focal Point* PUG, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, sumber informasi, dan dinamisator PUG di lingkungan internal. Tanpa

Focal Point yang berfungsi, inisiatif PUG akan berjalan parsial dan tidak terkoordinasi.

Rekomendasi Aksi:

1. **Formalisasi *Focal Point* Melalui SK Kepala Dinas:** Segera terbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang Pembentukan Tim *Focal Point* PUG. SK ini harus mencantumkan nama-nama anggota tim yang idealnya berasal dari berbagai bidang (misalnya, perencanaan, industri, perdagangan, pasar) untuk memastikan representasi dan kemudahan koordinasi.
2. **Penyusunan Uraian Tugas yang Jelas (TOR):** Lampirkan *Terms of Reference* (TOR) atau Uraian Tugas yang jelas dalam SK tersebut. Tugas *Focal Point* harus mencakup:
 - o Mengoordinasikan penyusunan dokumen GAP dan GBS untuk program-program strategis dinas.
 - o Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data terpilah dari seluruh bidang.
 - o Menjadi narahubung utama antara DISPERINDAG dengan Kelompok Kerja (Pokja) PUG tingkat kabupaten.
 - o Menyusun laporan implementasi PUG secara berkala (misalnya, triwulanan atau semesteran) untuk disampaikan kepada Kepala Dinas dan Pokja PUG Kabupaten.

2.3. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan DISPERINDAG dengan RAD PUG Kabupaten

Untuk menunjukkan adanya komitmen yang terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga perangkat daerah, dokumen perencanaan DISPERINDAG harus selaras dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Bengkayang. Penilai APE akan mencari "benang merah" yang menghubungkan kebijakan makro daerah dengan program mikro di tingkat dinas.

Rekomendasi Aksi:

1. **Adopsi Eksplisit dalam Renstra dan Renja:** Secara eksplisit, rujuk dan kutip pasal atau bagian relevan dari RAD PUG Kabupaten Bengkayang dalam dokumen Renstra dan Renja DISPERINDAG, terutama pada bab pendahuluan, analisis isu strategis, dan arah kebijakan.
2. **Pemetaan Program terhadap Aksi dalam RAD:** Buat matriks pemetaan yang menunjukkan bagaimana setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh DISPERINDAG secara langsung menjawab sasaran atau rencana aksi yang tercantum dalam RAD PUG, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Matriks ini akan menjadi bukti dukung yang sangat kuat saat verifikasi administrasi.

Bab 3: Panduan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

3.1. Aplikasi Praktis *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk Program DISPERINDAG

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah alat analisis wajib yang digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang telah mempertimbangkan kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan GAP secara sistematis adalah bukti konkret adanya perencanaan yang responsif gender. Proses GAP terdiri dari sembilan langkah yang terbagi dalam tiga tahap, yang memandu perencana mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan indikator keberhasilan. Langkah-langkah ini memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dan intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

3.2. Penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) yang Akuntabel

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban yang menerjemahkan hasil analisis GAP ke dalam format penganggaran. GBS bukanlah anggaran terpisah untuk perempuan, melainkan sebuah pernyataan yang menjelaskan bagaimana alokasi anggaran dalam suatu kegiatan akan berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam GAP. Dokumen ini menjadi justifikasi utama untuk Anggaran Responsif Gender (ARG) dan merupakan lampiran wajib dalam

sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah. GBS memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki tujuan gender yang jelas dan terukur.

3.3. Studi Kasus Terapan: Menyusun GAP dan GBS untuk Program "IKM Perempuan Naik Kelas"

Untuk memberikan panduan praktis, berikut disajikan contoh pengisian GAP dan GBS untuk program hipotetis "Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing IKM Perempuan Melalui Digitalisasi (IKM Perempuan Naik Kelas)". Contoh ini dapat dijadikan templat bagi para perencana di DISPERINDAG.

Tabel 3.1: Contoh Aplikasi GAP dan GBS untuk Program "IKM Perempuan Naik Kelas"

| Langkah GAP | Analisis / Jawaban |
|---|--|
| Tahap I: Analisis Kebijakan Responsif Gender | |
| 1. Kebijakan/Program/Kegiatan yang Dianalisis | <p>Program: Peningkatan Daya Saing IKM. Kegiatan: Pelatihan Pemasaran Digital dan Fasilitasi Legalitas Usaha bagi IKM. Tujuan: Meningkatkan omzet dan jangkauan pasar IKM di Kabupaten Bengkayang.</p> <p>Data BPS Bengkayang 2024 menunjukkan 68% pelaku IKM adalah perempuan. Namun, data internal DISPERINDAG menunjukkan 85% dari IKM milik perempuan masih berada di skala mikro (omzet < Rp10 juta/bulan) dan 90% belum memiliki NIB dan sertifikasi Halal. Hanya 15% perempuan pemilik IKM yang aktif menggunakan <i>marketplace</i> untuk pemasaran.</p> |
| 2. Sajikan Data Terpilah | <p>Akses: Perempuan memiliki akses lebih rendah terhadap pelatihan digital marketing dan informasi mengenai prosedur legalitas usaha. Partisipasi: Partisipasi perempuan dalam pameran dagang tingkat provinsi lebih rendah (20%) dibandingkan laki-laki (80%) karena keterbatasan mobilitas dan beban domestik. Kontrol: Keputusan strategis bisnis (misalnya, mengambil pinjaman modal) seringkali masih memerlukan persetujuan suami. Manfaat: Manfaat dari pertumbuhan ekonomi digital belum dinikmati secara merata oleh pelaku IKM perempuan.</p> |
| 3. Identifikasi Kesenjangan Gender (AKPM) | <p>Kurikulum pelatihan yang ada bersifat umum dan belum spesifik menjawab kendala yang dihadapi perempuan (misalnya, manajemen waktu antara usaha dan rumah tangga). Jadwal pelatihan seringkali tidak fleksibel (jam kerja kantor). Kurangnya petugas pendamping lapangan perempuan.</p> |
| 4. Identifikasi Penyebab Internal Kesenjangan | |
| 5. Identifikasi Penyebab Eksternal Kesenjangan | <p>Norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik membatasi</p> |

Langkah GAP

Analisis / Jawaban

waktu untuk pengembangan usaha. Stereotip bahwa teknologi adalah domain laki-laki. Akses terhadap gawai dan internet masih terbatas bagi sebagian perempuan di perdesaan.

Tahap II: Formulasi Kebijakan dan Rencana Aksi Masa Depan

6. Rumuskan Ulang Tujuan

Tujuan Responsif Gender: Meningkatkan kapasitas, legalitas, dan akses pasar digital bagi IKM yang dikelola perempuan, sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan pendapatan mereka secara signifikan.

7. Rencana Aksi

1. Mengembangkan modul pelatihan pemasaran digital yang fleksibel (metode *hybrid*) dan relevan dengan konteks perempuan wirausaha. 2. Menyelenggarakan klinik layanan "jemput bola" untuk fasilitasi pendaftaran NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal di sentra-sentra IKM perempuan. 3. Membangun program mentorship yang menghubungkan IKM perempuan pemula dengan pengusaha perempuan yang lebih senior (misalnya dari IWAPI).

Tahap III: Pengukuran Hasil

8. Data Dasar (Baseline)

Jumlah IKM milik perempuan yang memiliki NIB: 10%. Jumlah IKM milik perempuan yang memiliki sertifikasi Halal: 5%. Omzet rata-rata bulanan IKM perempuan: Rp 3,5 juta. Jumlah IKM perempuan yang menjual produk di *marketplace*: 15%.

9. Indikator Kinerja Gender

Output: 100 IKM perempuan terlatih pemasaran digital; 75 IKM perempuan difasilitasi NIB; 50 IKM perempuan difasilitasi sertifikasi Halal. **Outcome:** Peningkatan omzet rata-rata IKM perempuan peserta sebesar 30% dalam 1 tahun pasca-pelatihan. Peningkatan jumlah IKM perempuan yang aktif di *marketplace* menjadi 50%.

Export to Sheets

Contoh Format Gender Budget Statement (GBS)

Program: Peningkatan Daya Saing IKM **Kegiatan:** Pelatihan Pemasaran Digital dan Fasilitasi Legalitas Usaha bagi IKM **Output Kegiatan:** Meningkatkan Kapasitas Pemasaran dan Legalitas IKM **Jumlah Anggaran Kegiatan:** Rp 250.000.000

Komponen GBS

Uraian

1. Analisis Situasi

Berdasarkan data, 68% IKM di Bengkayang dikelola perempuan, namun 85% masih berskala mikro dan tertinggal dalam adopsi

Komponen GBS

Uraian

digital serta legalitas usaha. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor internal (kurikulum pelatihan yang tidak fleksibel) dan eksternal (beban ganda dan stereotip gender). Kegiatan ini dirancang untuk secara langsung mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan pelatihan yang aksesibel dan fasilitasi legalitas yang proaktif, sehingga perempuan pelaku IKM dapat meningkatkan skala usahanya.

2. Rencana Aksi dan Alokasi Anggaran untuk Mengatasi Kesenjangan

Rencana Aksi 1: Pelatihan Pemasaran Digital *Hybrid* untuk 100 IKM Perempuan. **Output:** 100 IKM perempuan mampu membuat konten promosi dan mengelola akun *marketplace*. **Anggaran:** Rp 120.000.000 (Untuk honor narasumber, materi, kuota internet peserta daring, konsumsi). **Rencana Aksi 2:** Klinik Layanan "Jemput Bola" Fasilitasi NIB dan Halal untuk 75 IKM Perempuan. **Output:** 75 IKM perempuan memiliki NIB dan terdaftar dalam proses sertifikasi Halal. **Anggaran:** Rp 80.000.000 (Untuk biaya transportasi petugas, ATK, biaya pendaftaran awal). **Rencana Aksi 3:** Program Mentorship dengan IWAPI. **Output:** Terlaksananya 3 sesi pendampingan bisnis bagi 100 peserta. **Anggaran:** Rp 50.000.000 (Untuk uang saku mentor, biaya koordinasi, materi).

3. Dampak/Hasil yang Diharapkan dari Output Kegiatan

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan omzet rata-rata IKM perempuan sebesar 30% dalam 1 tahun. Selain itu, jumlah IKM perempuan yang memiliki legalitas usaha dan aktif di pasar digital akan meningkat signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan dan kontribusi mereka terhadap PDRB Kabupaten Bengkayang.

Export to Sheets

Bab 4: Desain dan Implementasi Program Unggulan Responsif Gender

4.1. Program 1: IKM Perempuan Naik Kelas

Program ini dirancang sebagai intervensi komprehensif untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dikelola perempuan, sejalan dengan temuan dalam analisis GAP. Fokus program adalah memberikan keterampilan praktis, memfasilitasi legalitas, dan menyediakan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan IKM perempuan dapat benar-benar "naik kelas".

- **Kurikulum Pelatihan Komprehensif:** Kurikulum pelatihan akan dirancang secara modular dan praktis, mengacu pada praktik terbaik pemberdayaan wirausaha perempuan. Modul-modul kunci meliputi:

1. **Membangun Mindset Wirausaha dan Model Bisnis:** Menggunakan *Business Model Canvas* untuk memetakan dan memperkuat pondasi bisnis.
 2. **Literasi Keuangan Praktis:** Pelatihan pencatatan keuangan sederhana, penentuan harga pokok penjualan (HPP), dan manajemen arus kas.
 3. **Pemasaran Digital Terapan:** Pelatihan praktis membuat foto produk menarik menggunakan ponsel, menulis deskripsi produk yang menjual, dan mengelola akun media sosial (Facebook, Instagram) serta *marketplace*.
 4. **Branding dan Pengemasan:** Workshop mendesain logo dan kemasan sederhana yang menarik untuk meningkatkan nilai jual produk.
 5. **Dasar-Dasar Legalitas Usaha:** Sosialisasi mengenai pentingnya dan cara memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
- **Fasilitasi Sertifikasi Produk:** Mengingat legalitas dan standardisasi adalah kunci untuk memasuki pasar yang lebih luas, program ini akan menyediakan klinik layanan terpadu untuk fasilitasi :
 - **Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT):** Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan dan memfasilitasi proses pengajuan P-IRT bagi IKM pangan.
 - **Sertifikasi Halal:** Membantu IKM mendaftar pada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari pemerintah atau skema *self-declare* bagi usaha mikro, bekerja sama dengan lembaga terkait.
 - **Pendampingan Berkelanjutan:** Pelatihan saja tidak cukup. Program ini akan dilengkapi dengan sesi pendampingan pasca-pelatihan selama 3-6 bulan, di mana para peserta dapat berkonsultasi dengan mentor mengenai tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan ilmu yang didapat.

4.2. Program 2: Revitalisasi Pasar Rakyat Aman, Nyaman, dan Berdaya Saing

Pasar rakyat adalah pusat ekonomi vital di mana perempuan mendominasi sebagai pedagang. Program revitalisasi pasar yang responsif gender tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang aman, sehat, dan memberdayakan bagi semua penggunanya, terutama perempuan dan anak-anak.

- **Integrasi SNI 8152:2021 sebagai Standar Dasar:** Seluruh upaya revitalisasi akan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 tentang Pasar Rakyat sebagai standar minimum untuk aspek teknis dan pengelolaan, yang mencakup zonasi, kebersihan, dan manajemen.
- **Intervensi Spesifik Responsif Gender:** Di atas standar SNI, program ini akan menambahkan intervensi khusus yang menjawab kebutuhan perempuan dan kelompok rentan:
 1. **Infrastruktur Fisik yang Aman dan Nyaman:**
 - **Pencahayaan Memadai:** Memastikan seluruh area pasar, termasuk lorong-lorong, area parkir, dan toilet, memiliki pencahayaan yang terang untuk mencegah tindak kriminalitas dan memberikan rasa aman.
 - **Toilet Terpisah dan Layak:** Membangun atau merenovasi toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan yang bersih, memiliki

ketersediaan air yang cukup, kunci yang berfungsi, dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

- **Ruang Laktasi dan Fasilitas Anak:** Menyediakan ruang laktasi yang bersih, privat, dan nyaman sesuai amanat Permenkes, serta area bermain anak yang aman dan terawasi. Ini akan sangat membantu pedagang dan pembeli perempuan yang membawa anak.
- 2. **Peningkatan Keamanan:** Memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis seperti pintu masuk/keluar dan area ramai (namun tidak di area privat seperti toilet atau ruang laktasi) serta mendirikan pos keamanan yang responsif dan mudah dihubungi.
- 3. **Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Perempuan:**
 - **Fasilitasi Asosiasi Pedagang Perempuan:** Mendorong dan memfasilitasi pembentukan paguyuban atau asosiasi pedagang perempuan di pasar sebagai wadah advokasi, berbagi informasi, dan penguatan kapasitas.
 - **Pelatihan Literasi Digital dan Keuangan:** Mengadakan pelatihan reguler bagi pedagang, khususnya perempuan, mengenai pengelolaan keuangan usaha dan pemanfaatan sistem pembayaran digital (QRIS) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

4.3. Program 3: Kemitraan Strategis untuk Akses Pasar

Memenuhi indikator partisipasi masyarakat dalam APE memerlukan bukti kolaborasi yang nyata dan terdokumentasi dengan "Dunia Usaha" dan "Lembaga Masyarakat". Kemitraan strategis tidak hanya memperluas jangkauan program DISPERINDAG, tetapi juga berfungsi sebagai pengganda kekuatan dalam menghasilkan bukti dukung untuk penilaian APE. Setiap kegiatan bersama secara otomatis menghasilkan laporan, foto, dan daftar hadir yang dapat diklaim oleh kedua belah pihak, sehingga lebih efisien.

- **Sinergi dengan DEKRANASDA Kabupaten Bengkayang:** DEKRANASDA memiliki fokus pada pengembangan kerajinan lokal dan akses pasar, termasuk pasar ekspor ke Malaysia.
 - **Rekomendasi Aksi:** Menandatangani MoU antara DISPERINDAG dan DEKRANASDA untuk:
 1. **Kurasi dan Promosi Bersama:** Melakukan kurasi bersama produk-produk IKM binaan DISPERINDAG untuk dipromosikan dan dijual di Galeri Dekranasda yang baru diresmikan.
 2. **Pelatihan Inovasi Produk Ekspor:** Mengadakan workshop bersama yang menargetkan IKM kerajinan (misalnya, Bidai dan batik khas Bengkayang) untuk meningkatkan desain dan kualitas produk agar memenuhi standar pasar Sarawak, Malaysia.
- **Kolaborasi dengan IWAPI Kalimantan Barat:** Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) memiliki tujuan untuk memperkuat eksistensi dan kapasitas pengusaha perempuan serta membantu mereka mengakses pasar.
 - **Rekomendasi Aksi:** Membangun kemitraan formal dengan DPD IWAPI Kalbar dan DPC IWAPI di Bengkayang (jika sudah terbentuk) untuk:

1. **Program Mentorship:** Melibatkan anggota IWAPI yang sudah mapan sebagai mentor bagi peserta program "IKM Perempuan Naik Kelas".
2. **Business Matching:** Menggelar acara temu bisnis yang mempertemukan IKM perempuan binaan DISPERINDAG dengan anggota IWAPI dan jaringan bisnis mereka untuk membuka peluang kemitraan, rantai pasok, dan akses pasar yang lebih luas. Hal ini secara langsung menjawab tantangan utama yang dihadapi IWAPI, yaitu mengubah *mindset* dan memperluas pasar bagi anggotanya.

Bab 5: Pembangunan Sistem Data Terpilah dan Mekanisme Monitoring-Evaluasi

5.1. Pengembangan Basis Data Terpilah Pelaku Usaha Binaan

Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin adalah fondasi dari seluruh siklus PUG dan merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam penilaian APE. Tanpa data yang akurat, analisis gender menjadi tidak valid, program menjadi tidak tepat sasaran, dan evaluasi menjadi tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, DISPERINDAG harus beralih dari pengumpulan data yang bersifat

ad-hoc menjadi sebuah sistem manajemen data yang terstruktur.

Implementasi basis data ini adalah sebuah *quick win* yang berdampak besar. Ini menyediakan alat praktis bagi DISPERINDAG untuk secara sistematis mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pelaporan APE. Dengan data yang terstruktur, penyusunan laporan yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kesalahan dapat menjadi proses yang cepat dan akurat melalui kueri data atau *pivot table*.

Tabel 5.1: Template Basis Data Terpilah Pelaku Usaha Binaan DISPERINDAG (Format Excel)

| Nama Usaha | Nama Pemilik | NIK | Jenis Kelamin (L/P) | Alamat Lengkap | Jenis Usaha (Industri/Perdagangan) | Skala Usaha (Mikro/Kecil) | Omzet Rata-rata (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja (L) | Jumlah Tenaga Kerja (P) | Program DISPERINDAG yang diikuti | Tahun Mengikuti | Jenis Fasilitas | Punya NIB (Y/T) | Punya PIR (Y/T) | Punya Sertifikat Halal (Y/T) |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Keripik Singkong "Rehnya" | Ibu Siti Aminah | 610... | P | Desa Maju Jaya | Industri Makanan | Mikro | 4.500.000 | 0 | 2 | IKM Naik Kelas | 2025 | Pelatihan Digital, Fasilitas NIB | Y | T | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|---|--------------------|----------------|-------|------------|---|---|--------------------|------|----------------|---|-----|-----|
| Bengkel Las "Jay a" | Bapak Budi Santoso | 6100.. | L | Jl. Merdeka No. 10 | Industri Logam | Kecil | 25.000.000 | 3 | 1 | - | - | - | Y | T/A | T/A |
| Toko Kelontong "Berkah" | Ibu Maria | 6100.. | P | Pasar Pagi Blok A | Perdagangan | Mikro | 8.000.000 | 1 | 1 | Revitalisasi Pasar | 2026 | Pelatihan QRIS | Y | T/A | T/A |

5.2. Merancang Indikator Kinerja Gender untuk Mengukur Dampak

Untuk membuktikan bahwa program PUG berhasil, DISPERINDAG harus mampu mengukur dampaknya, bukan hanya laporannya. Ini berarti beralih dari sekadar mengukur *output* (keluaran) menuju pengukuran *outcome* (hasil), sesuai dengan kerangka GAP dan GBS. Indikator

outcome menunjukkan perubahan nyata pada kondisi, status, dan kesejahteraan penerima manfaat.

- **Contoh Indikator Output (Mengukur Pelaksanaan):**
 - Jumlah IKM milik perempuan yang mengikuti pelatihan pemasaran digital.
 - Jumlah toilet perempuan yang dibangun di pasar rakyat.
 - Jumlah MoU kemitraan yang ditandatangani dengan organisasi perempuan.
- **Contoh Indikator Outcome (Mengukur Dampak):**
 - Persentase peningkatan omzet rata-rata IKM milik perempuan dalam satu tahun setelah mengikuti program.
 - Jumlah IKM milik perempuan yang berhasil naik kelas dari skala mikro ke kecil.
 - Persentase peningkatan jumlah pedagang perempuan di pasar rakyat yang menggunakan pembayaran digital (QRIS) setelah program revitalisasi.
 - Penurunan angka keluhan terkait keamanan yang dilaporkan oleh pedagang perempuan di pasar.

5.3. Mekanisme Pelaporan dan Kontribusi terhadap Laporan PUG Kabupaten

Implementasi PUG yang baik harus diakhiri dengan pelaporan yang sistematis. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban internal tetapi juga sebagai kontribusi vital bagi penyusunan laporan PUG tingkat kabupaten untuk APE.

Rekomendasi Aksi:

1. **Tetapkan Siklus Pelaporan Internal:** Tim *Focal Point* PUG DISPERINDAG harus menetapkan siklus pelaporan internal (misalnya, setiap triwulan). Setiap bidang/seksi wajib melaporkan kemajuan program/kegiatan beserta data terpilah dan bukti dukung (laporan kegiatan, foto, daftar hadir) kepada *Focal Point*.

2. **Konsolidasi Laporan Tingkat Dinas:** *Focal Point* bertugas mengonsolidasikan laporan dari semua bidang menjadi satu Laporan Implementasi PUG DISPERINDAG yang komprehensif. Laporan ini harus memuat analisis capaian berdasarkan indikator *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan.
3. **Penyampaian Laporan ke Pokja PUG Kabupaten:** Laporan terkonsolidasi dari DISPERINDAG kemudian secara resmi disampaikan kepada Pokja PUG Kabupaten. Mekanisme ini memastikan bahwa semua capaian dan praktik baik dari DISPERINDAG terdokumentasi dan terhitung dalam penilaian APE Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan.

Bab 6: Peta Jalan (Roadmap) Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

6.1. Peta Jalan Aksi Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Untuk memastikan strategi ini dapat dieksekusi secara efektif, diperlukan sebuah peta jalan yang jelas, terukur, dan memiliki penanggung jawab. Peta jalan ini merangkum seluruh rekomendasi ke dalam sebuah lini masa yang actionable, berfungsi sebagai panduan bagi pimpinan dan perencana DISPERINDAG dalam mengalokasikan sumber daya dan memantau kemajuan.

Tabel 6.1: Peta Jalan Implementasi PUG DISPERINDAG Bengkayang (2025-2029)

| Prioritas Aksi | Kegiatan Utama | Penanggung Jawab (Unit/Seksi) | Target Waktu | Indikator APE Terkait | Bukti Dukung yang Dihilangkan |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---|--|
| Jangka Pendek (Tahun 1 - 2025) | | | | | |
| Penguatan Kelembagaan | 1. Formalisasi Tim <i>Focal Point</i> PUG melalui SK Kadis. 2. Audit kompetensi PUG & pelatihan dasar bagi seluruh staf. 3. Implementasi basis data terpilah IKM/UMKM. | Sekretariat, Bidang Perencanaan | Q1-Q2 2025 | Kelembagaan, SDM & Anggaran, Data & Informasi | SK Tim Focal Point, Laporan Audit Kompetensi, Sertifikat Pelatihan, <i>File</i> Basis Data Excel |
| Kemitraan Strategis | 1. Penandatanganan MoU dengan DEKRANASDA & IWAPI. 2. Pelaksanaan 1 kegiatan bersama dengan masing-masing mitra. | Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian | Q2-Q3 2025 | Partisipasi Masyarakat | Dokumen MoU, Laporan Kegiatan Bersama, Foto, Daftar Hadir |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------|--|---|
| Program Unggulan | 1. Pelaksanaan <i>pilot project</i> "IKM Perempuan Naik Kelas" untuk 50 peserta. 2. Penyusunan GAP & GBS untuk <i>pilot project</i> . | Bidang Perindustrian | Q3-Q4 2025 | Kebijakan Teknis & Program | Dokumen GAP & GBS, Laporan Pelaksanaan Pelatihan, Dokumentasi |
| Jangka Menengah (Tahun 2-3 - 2026-2027) | | | | | |
| Pelembagaan PPRG | 1. Implementasi penuh penyusunan GAP & GBS untuk 3 program prioritas setiap tahun. 2. Pelatihan PUG tingkat lanjut (PPRG) bagi tim perencana. | Bidang Perencanaan, Tim Focal Point | 2026-2027 | Kebijakan Teknis & Program, SDM & Anggaran | Dokumen GAP & GBS untuk 6 program, Sertifikat Pelatihan PPRG |
| Revitalisasi Pasar | 1. Pelaksanaan <i>pilot project</i> Revitalisasi Responsif Gender di 1 pasar percontohan. 2. Pengukuran <i>baseline</i> kepuasan & keamanan pedagang. | Bidang Pasar, Bidang Perdagangan | 2026-2027 | Pelaksanaan Pembangunan | Dokumen Perencanaan Teknis, Laporan Pembangunan Fisik, Laporan Survei <i>Baseline</i> |
| Jangka Panjang (Tahun 4-5 - 2028-2029) | | | | | |
| Evaluasi & Replikasi | 1. Evaluasi dampak program "IKM Naik Kelas" & Revitalisasi Pasar. 2. Replikasi program sukses ke lokasi/kelompok sasaran baru. | Bidang Perencanaan, Tim Focal Point | 2028-2029 | Evaluasi, Pelaporan | Laporan Evaluasi Dampak, Dokumen Perencanaan Replikasi Program |
| Diseminasi & Pembinaan | 1. Penyusunan dokumen "Praktik Baik PUG Sektor Ekonomi". 2. Berbagi pengalaman dan menjadi mentor bagi OPD lain di Kabupaten Bengkayang. | Kepala Dinas, Tim Focal Point | 2029 | - | Buku/Modul Praktik Baik, Laporan Kegiatan Diseminasi |

6.2. Rekomendasi Kebijakan Internal untuk Keberlanjutan PUG

Agar implementasi PUG tidak bersifat sesaat atau bergantung pada individu tertentu, PUG harus dilembagakan ke dalam sistem dan budaya kerja DISPERINDAG. Keberlanjutan adalah kunci untuk mempertahankan prestasi APE di masa depan.

Rekomendasi Kebijakan:

1. **Menerbitkan Peraturan Kepala Dinas (Perkadis):** Susun dan sahkan Peraturan Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan DISPERINDAG. Peraturan ini akan menjadi payung hukum internal yang mewajibkan penggunaan analisis gender (GAP), penyusunan GBS, pengumpulan data terpilah, dan mekanisme pelaporan PUG dalam setiap proses kerja.
2. **Integrasi PUG dalam Manajemen Kinerja:** Masukkan indikator kinerja terkait PUG ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), terutama bagi pejabat eselon III dan IV serta staf fungsional perencanaan. Contohnya, "Tersusunnya dokumen GAP dan GBS untuk kegiatan X" atau "Tersedianya laporan data terpilah triwulanan". Hal ini menciptakan insentif dan akuntabilitas individu terhadap pelaksanaan PUG.
3. **Alokasi Anggaran Rutin untuk Peningkatan Kapasitas:** Alokasikan secara permanen pos anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai pelatihan, bimbingan teknis, dan pengiriman staf untuk mengikuti sertifikasi, memastikan keberlanjutan pengembangan kompetensi PUG di masa depan.